

**PENGUNAAN REKAYASA AKRUAL
DALAM MANAJEMEN LABA UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK**

SKRIPSI



Ditulis oleh :

Nama : Ananta Mahendra
Nomor Mahasiswa : 00312006
Program studi : Akuntansi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005**

**PENGGUNAAN REKAYASA AKRUAL
DALAM MANAJEMEN LABA UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK**

SKRIPSI

disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata- 1 Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Ananta Mahendra
Nomor Mahasiswa : 00312006

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman /sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 29 Agustus 2005

Penyusun,

(Ananta Mahendra)

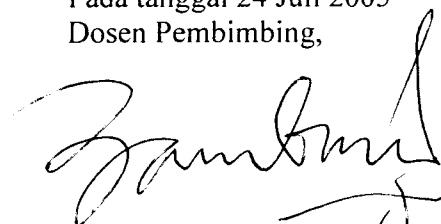
**PENGGUNAAN REKAYASA AKRUAL
DALAM MANAJEMEN LABA UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK**

Hasil Penelitian

Ditulis oleh :

Nama : Ananta Mahendra
Nomor Mahasiswa : 00312006
Program studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen
Pembimbing
Pada tanggal 24 Juli 2005
Dosen Pembimbing,



(Drs. Kesit Bambang, M.Si)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

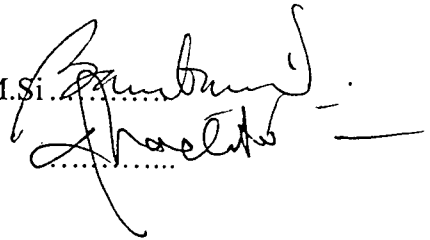
**PENGUGUNAAN REKAYASA AKRUAL DALAM MANAJEMEN LABA UNTUK
MEMINIMALKAN PAJAK**

**Disusun Oleh: ANANTA MAHENDRA
Nomor mahasiswa: 00312006**

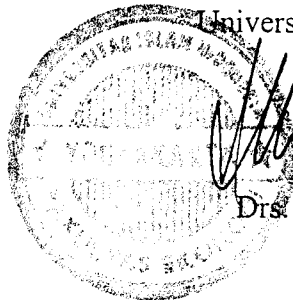
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 16 Agustus 2005


Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si.

Penguji : Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Drs. Suwarsono, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggunaan Rekayasa Akrual Dalam Manajemen Laba Untuk Meminimalkan Pajak” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu kelancaran penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini. Terima kasih tersebut disampaikan kepada :

1. Ayah, Ibu, dan Adik-adik yang selalu memberi dukungan dan harapan hingga tercapainya kelulusan ini.
2. Bp. Drs. Suwarsono Muhammad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Bp. Suwaldiman selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bp. Drs. Kesit Bambang, M.Si atas bimbingan dan kesabarannya sebagai dosen pembimbing skripsi
5. Bp. Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak selaku dosen penguji yang juga memberi arahan dan petunjuk penyusunan skripsi
6. Teman-teman yang telah menjalani kebersamaan sejak awal kuliah sampai saat ini: Abe (yo ngegame lagi be..), Franky (keep fight ya, don't give up), Hendry (jangan nyante terus sich..), Nofri (hidup wajar ya..., jangan yang aneh-aneh)
7. Teman-teman satu rumah yang lagi usaha jalanin hidup rumah tangga: Arief (wise man say... ini itu dan itu ini, ya begitulah..), Panji(jangan lupa tanggung jawabnya loh), Renol (ingat.. ada yang nunggu di rumah), Rudy(hidup ngga' sendiri loh), Heru (kedapetan deh manjanya), Ferdy (perhatiin arus donk, jangan asal ngikut), dan teman-teman kos lama (mo tanding bola lawan siapa lagi yach)
8. Teman-teman KKN: Aang, Bagus, Didik, Dur, Ita, Melly, Hetty, Sari, Markos, Aji (pada kemana aja kalean)
9. Teman lainnya yang ikut mendukung penulis: Fajar (perjuangan kita sementara sampai disini dulu, bersiap buat tantangan baru ya), Made (yang biasa ngomporin

biar cepet lulus), Olil, Dante, Ridha, Iil, Nanda, Wibi, Sigit, Sari, Kiki, Luthfi, Lian, Hilda, Lina, Reta, Heni, Ryan, dan lainnya.

10. Saudara dan kerabat dekat: Om, Tante, Pakdhe, Budhe, Mbak, Mas, Adik, Eyang, Keponakan, semua dech.

11. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang secara tidak langsung telah membantu kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 Agustus 2005

Hormat Saya,

Penulis

Daftar Isi

	Hal
Halaman Judul	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Berita Acara	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
Bab I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Batasan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
Bab II. Kajian Pustaka	
2.1. Konsep Pelaporan Laba	9
2.2. Konsep Manajemen Laba	12
2.3. Teori Keagenan	16
2.4. Dasar AkruaI Dalam Pencatatan Arus Kas	17
2.5. Undang-Undang Perpajakan	19
2.6. Pajak Penghasilan	21
2.6.1. Subjek Pajak Penghasilan	24
2.6.2. Objek Pajak Penghasilan	27
2.7. Hubungan Manajemen Laba Dengan Rekayasa AkruaI Terhadap Pajak	29
2.8. Penelitian Terdahulu	29
Bab III. Metodologi Penelitian	
3.1. Metode Penelitian	32
3.2. Spesifikasi Populasi dan Sampel	32
3.3. Jenis Data dan Variabel	33
3.4. Analisis dan Pengolahan Data	34
3.5. Pengujian Hipotesis	35
Bab IV. Analisis dan Pembahasan	
4.1. Analisis Data	39
4.2. Model Estimasi Tingkat AkruaI Normal	40
4.3. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis	41
4.3.1. Uji t	42
4.3.2. Uji Beda dua Rata-Rata	43

Bab V. Kesimpulan dan Saran	
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Keterbatasan Penelitian	46
5.3. Saran Penelitian Selanjutnya	46
Daftar Pustaka	48
Lampiran-Lampiran	49

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1. Klasifikasi Laba Bersih Menurut Pihak Penerima	
Laba	11
Tabel 2.2. Perbedaan Tarif UU PPh Tahun 1983, 1994, dan 2000	
Untuk Wajib Pajak Badan	21
Tabel 2.3. Perbedaan Tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak	
Untuk Wajib Pajak Pribadi	22
Tabel 4.1. Estimasi Koefisien Akrua Normal	41
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Nilai t	42
Tabel 4.3. Hasil Pengujian Beda Dua Rata-Rata	44

Daftar Lampiran

	Hal
Lampiran 1. Variabel	49
Lampiran 2. Regresi	55
Lampiran 3. Uji t	57
Lampiran 4. Uji Beda Dua Rata-Rata	58

ABSTRAKSI

Penelitian ini memberikan tinjauan tentang salah satu jenis manipulasi akuntansi yaitu manajemen laba. Tetapi praktik manajemen laba ini hanya terbatas pada fungsinya yang digunakan perusahaan untuk minimalisasi pengenaan pajak penghasilan dengan memanfaatkan peristiwa pergantian undang-undang perpajakan terutama pada pajak penghasilan. Praktik manajemen laba ini sulit untuk dideteksi, selain itu manajemen laba yang merupakan sebuah rekayasa akuntansi bisa dikatakan terdapat hubungan yang positif antara praktik tersebut dengan nilai pasar perusahaan. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan nilai laba yang muncul karena perubahan di dalam pelaporannya, yang menimbulkan kecenderungan menguntungkan bagi pihak perusahaan, karena dapat meningkatkan potensi perusahaan di mata investor. Dengan manajemen laba ini perusahaan bisa menggeser laba atau biaya agar labanya rata antar periode atau melaporkannya lebih tinggi untuk kepentingan investasi, dan lebih rendah untuk kepentingan minimalisasi pajak.

Penelitian ini mengangkat perilaku manajemen laba hubungannya dengan minimalisasi pajak, karena pada saat diberlakukannya undang-undang perpajakan yang baru terdapat penurunan tarif pengenaan pajak pada periode berlakunya undang-undang. Pada kesempatan ini perusahaan dapat menggeser labanya dengan manajemen laba dari tahun sebelum berlakunya ke tahun tahun berlakunya undang-undang baru. Dengan pergeseran laba ini maka pajak yang ditanggung perusahaan dapat berkurang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi yang kita kenal memungkinkan suatu fakta yang sama dilaporkan dengan cara yang berbeda Weschler (1989). Terdapat fakta terkait, bahwa satu mesin yang sama dapat didepresiasi dengan dua metode yang berbeda (metode depresiasi garis lurus atau dengan metode saldo menurun) atau dengan dua estimasi umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan metode atau perbedaan estimasi tersebut akan menghasilkan nilai akhir (laba) yang sedikit berbeda. Karena perbedaan penilaian penyusutan akan mempengaruhi nilai barang yang mengalami penyusutan, bisa saja mempunyai nilai penyusutan yang besar atau hanya mengalami penyusutan nilai yang tidak terlalu besar, sehingga dapat mempengaruhi perhitungan harga pokok untuk dibandingkan dengan pendapatan dan harga yang berlaku di pasar yang nantinya akan menghasilkan laba. Apabila perusahaan bisa memperoleh laba yang lebih besar atas barang yang sama tetapi menggunakan metode penyusutan yang berbeda, akan menguntungkan posisi perusahaan di mata investor ataupun bagian internal perusahaan, karena perusahaan dinilai mempunyai kinerja yang bagus sehingga dapat menghasilkan laba.

Laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan sebagai dasar untuk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi yang kita kenal memungkinkan suatu fakta yang sama dilaporkan dengan cara yang berbeda Weschler (1989). Terdapat fakta terkait, bahwa satu mesin yang sama dapat didepresiasi dengan dua metode yang berbeda (metode depresiasi garis lurus atau dengan metode saldo menurun) atau dengan dua estimasi umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan metode atau perbedaan estimasi tersebut akan menghasilkan nilai akhir (laba) yang sedikit berbeda. Karena perbedaan penilaian penyusutan akan mempengaruhi nilai barang yang mengalami penyusutan, bisa saja mempunyai nilai penyusutan yang besar atau hanya mengalami penyusutan nilai yang tidak terlalu besar, sehingga dapat mempengaruhi perhitungan harga pokok untuk dibandingkan dengan pendapatan dan harga yang berlaku di pasar yang nantinya akan menghasilkan laba. Apabila perusahaan bisa memperoleh laba yang lebih besar atas barang yang sama tetapi menggunakan metode penyusutan yang berbeda, akan menguntungkan posisi perusahaan di mata investor ataupun bagian internal perusahaan, karena perusahaan dinilai mempunyai kinerja yang bagus sehingga dapat menghasilkan laba.

Laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan sebagai dasar untuk

memberikan bonus kepada manajer, digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak, dan juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, informasi laba dipegang oleh manajer yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan atas dasar keagenan. Dengan adanya wewenang itulah manajer bisa saja merubah informasi laba perusahaan sehingga bisa memperoleh keuntungan pribadi berupa bonus yang bertambah atau simpati dari pemilik karena kinerja yang menunjukkan angka laba yang mengesankan. Dalam hal ini, manajer sering memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba dengan rekayasa akrual, untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan antara lain adanya motivasi bonus, dianggap kinerjanya lebih baik, atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian Healy (1995) membuktikan bahwa sebagian manajer berusaha untuk memaksimalkan bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual. Sebagian manajer yang lain terbukti berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah berkaitan dengan pemberian proteksi impor Jones (1991). Ada juga manajer yang berusaha meminimalkan pajak yang mesti mereka bayarkan, dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah (Dhaliwal, Frankel dan Trezevant (1994); Guenther (1994); Cloyd, Pratt dan Stock (1996); Maydew (1997)). Manajemen laba dalam merekayasa angka laba dapat menggunakan rekayasa akrual yang dinilai legal untuk dilakukan, karena tidak bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Manajemen tetap mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standar akuntansi, tetapi dalam merekayasa hanya menggeser

pengakuannya, apakah itu mempercepat pengakuan pendapatan atau bebannya, atau memperlambat pengakuan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rekayasa angka akrual adalah rekayasa untuk menaikkan atau menurunkan porsi akrual dalam laba. Laba pada dasarnya merupakan jumlah kas bersih dari operasi dengan akrual. Akrual ini menjadi komponen laba karena pemakaian konsep akrual (sebagai lawan dari cash basis) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Contoh akrual yang menjadi komponen laba antara lain, piutang. Dalam akuntansi, piutang dicatat sebagai pendapatan sekalipun perusahaan belum menerima kas dari pendapatan tersebut. Misalnya perusahaan menjual barang dagangannya secara kredit, maka dalam konsep pencatatan akrual penjualan kredit tersebut dicatat atau dilaporkan pada saat terjadinya transaksi, berbeda dengan konsep cash basis yang pencatatannya dilakukan pada saat pembayaran barang tersebut diterima secara kas. Selain rekayasa laba dengan manajemen laba atau rekayasa akrual, dapat juga dilakukan dengan *fraud*. Untuk metode rekayasa laba yang dikenal dengan *fraud* ini sifatnya melanggar hukum secara umum. Walaupun sama dengan manajemen laba yang dilakukan secara sengaja dan melalui proses manipulasi, tetapi untuk *fraud* disertai dengan penciptaan bukti-bukti dan transaksi fiktif, seperti mencatat penjualan fiktif, mencatat persediaan fiktif, dan membuat ulang tagihan yang sudah lunas. Berbeda dengan manajemen laba yang tidak menggunakan bukti-bukti dan transaksi fiktif, Karena manajemen laba berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi, dengan tujuan untuk memaksimalkan laba atau menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak.

Keinginan untuk meminimalkan pajak atau meminimalkan total nilai pajak yang harus dibayar perusahaan Scott (1997); Setiawati dan Na'im (2000) merupakan salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba. Di Amerika, banyak studi empiris yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan, yang dikenal dengan TRA (Tax Reform Act), untuk mengevaluasi perilaku manajemen laba dalam kaitannya dengan minimalisasi pajak (Dhaliwal, Frankel dan Trezevant, 1994; Guenther, 1994; Cloyd, Pratt dan Stock, 1996; Maydew, 1997). TRA dipublikasikan pada bulan September 1986, dan berlaku efektif per 1 Juli 1987. Dengan TRA, tingkat pajak maksimum perusahaan berkurang dari 46% menjadi 34%. Penundaan pelaporan laba sebesar \$1 dari satu periode sebelum TRA efektif ke satu periode setelah TRA efektif dapat menghemat pajak sebesar \$0.12. Penghematan pajak ini dapat juga diartikan sebagai tambahan laba sebesar 22% [$0.12/(1-0.46)$] yang diperoleh hanya dengan menunda pelaporan laba satu periode fiskal.

Di Indonesia juga terjadi peralihan perundang-undangan dalam perpajakan yang mengakibatkan turunnya tarif pengenaan pajak atas penghasilan, karena terdapat perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Ada tiga kali perubahan tarif pajak penghasilan, yaitu tarif UU PPh tahun 1983 yang mulai diberlakukan tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, dan UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku tahun 2001. Perubahan UU yang mengubah lapisan penghasilan kena pajak dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai momen untuk meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan bisa menunda pengakuan laba dan mempercepat pengakuan beban tahun 2000, sehingga laba

tahun 2000 dapat dialihkan ke tahun 2001 yang nantinya akan dikenai pajak, sehingga dapat mengurangi beban pajak karena tarif pajak yang lebih kecil pada tahun 2001. Jadi seandainya perusahaan mempunyai laba pada tahun 2000 sebesar Rp 50.000.000, maka pajak yang akan dikenakan pada tahun 2000 sebesar Rp 6.250.000. Apabila laba tersebut diakui pada tahun 2001, maka pajak yang akan dikenakan sebesar Rp 5.000.000, maka dengan menggeser laba tersebut dari tahun 2000 ke tahun 2001, perusahaan dapat menghemat beban pajak sebesar Rp 750.000.

Dengan adanya peluang untuk menambahkan atau menggeser laba ke masa pergantian peraturan pengenaan tarif pajak penghasilan cukup dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba. Namun demikian pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan rekayasa laba. Pemahaman manajemen laba ini merupakan hal yang penting bagi akuntan karena akan meningkatkan pemahaman atas kegunaan informasi *net income*, baik yang dilaporkan kepada investor, kreditor maupun fiskus.

Masalah manajemen laba ini perlu untuk ditelaah dan dieksplorasi karena :

1. Standar akuntansi yang saat ini berlaku merupakan hasil rekayasa panjang sebagai hasil interaksi kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia bisnis. Jadi standar kita bukan satu peraturan mati yang tidak dapat diubah dan dikembangkan lagi.

2. Manajemen laba terbukti untuk sekian waktu dapat mengelabui pasar, meskipun pada akhirnya pasar menyadari akan adanya manajemen laba (Worthy, 1984; Teoh, Welch, dan Wong, 1998).

Munculnya fenomena manajemen laba yang memanipulasi laporan secara legal disertai dengan perubahan Undang-undang perpajakan yang mengubah lapisan penghasilan kena pajak, bisa diperkirakan akan ada tindakan dari manajemen laba untuk memanfaatkan momen perubahan tarif pajak tersebut. Manajemen laba mungkin akan melakukan rekayasa labanya agar dapat meminimalkan pajak akibat tarif yang berkurang persentasenya. Hal ini menarik perhatian penulis apakah benar terjadi rekayasa laba oleh manajemen laba untuk meminimalkan pajak atas penghasilannya. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul “PENGUNAAN REKAYASA AKRUAL DALAM MANAJEMEN LABA UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK”.

1.2. Perumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang diatas, masalah yang muncul adalah pada saat perubahan UU pajak penghasilan tahun 2000, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : Apakah perubahan tarif pajak penghasilan dan lapisan penghasilan kena pajak dalam UU tahun 2000 yang diberlakukan tahun 2001 tersebut direspon oleh manajemen untuk menjadi motivasi dalam melakukan rekayasa akrual dalam meminimumkan beban pajak penghasilan ?

1.3. Batasan Penelitian

1. Objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta yang mendapatkan laba pada periode tahun 1999, 2000 dan 2001, karena perusahaan yang merugi tidak dikenai pajak.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan Wajib Pajak Badan untuk periode tahun 1999, 2000 sampai 2001.
3. Pemilihan kebijakan atau metode akuntansi untuk perilaku manajemen laba dilakukan dengan pendekatan rekayasa *discretionary accrual*, yaitu tingkat laba yang tidak normal yang merupakan laba rekayasa dari pihak manajemen.
4. Perbedaan diasumsikan semata-mata untuk meminimalkan pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk :

1. Menguji apakah dengan adanya perubahan UU Pajak Penghasilan tahun 2000 direspon oleh wajib pajak untuk melakukan rekayasa akrual atas labanya guna meminimumkan beban pajak.
2. Menguji apakah ada perbedaan *discretionary accrual* sebelum dan sesudah pemberlakuan UU PPh tahun 2000.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empirik mengenai perilaku manajemen laba yang merekayasa angka laba secara akrual dengan memanfaatkan perubahan

undang-undang perpajakan dengan tarif baru yang lebih rendah, sehingga nantinya akan mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung pada periode sebelum berlakunya undang-undang.

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penagih pajak, dan pemakai laporan keuangan perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian-penelitian tentang manajemen laba hampir seluruhnya menggunakan pendekatan akrual, sehingga tidak heran sering disebut *earning management* dengan istilah *accrued management*. Pendekatan yang paling banyak digunakan dalam pengujian manajemen laba adalah model yang dikembangkan Jones (1991). Secara umum penelitian tentang manajemen laba menggunakan pengukuran berbasis akrual dan *accrual based measure* dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Pada dasarnya praktik manajemen laba ini sulit untuk dideteksi, selain itu beberapa hasil penelitian justru menunjukkan adanya hubungan positif antara praktik manajemen laba dengan nilai pasar perusahaan. Sehingga pada perusahaan yang melakukan manajemen laba justru mendapat respon yang positif oleh para pelaku pasar modal.

2.1. Konsep Pelaporan Laba

Fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai laba dan komponennya. Laba merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari investor dan kreditor. Menurut SFAC No.1 informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggung jawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earning power* perusahaan di masa yang

akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini didasari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasar informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku yang menyimpang (*disfunctional behaviour*), yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba.

Pengetahuan tentang pengukuran yang berbeda-beda atas laba bersih suatu perusahaan mungkin berguna untuk berbagai tujuan, tetapi akan lebih baik jika terdapat satu konsep laba bersih yang bersifat menyeluruh untuk tujuan pelaporan eksternal. Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi tentang posisi dan kondisi keuangan perusahaan yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan. Tujuan khusus yang dianggap paling penting bagi semua pemakai laporan keuangan adalah untuk membedakan antara modal yang diinvestasikan dan stok yang tersedia serta arus keuangan sebagai bagian dari proses akuntansi deskriptif. Tujuan lainnya meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen, penggunaan angka laba historis untuk membantu mermalkan keadaan usaha dan distribusi dividen di masa yang akan datang, sebagai dasar pengenaan pajak, alat pengawasan perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum, dan penggunaan laba sebagai sarana bagi para ekonom untuk mengevaluasi alokasi sumber daya.

Dalam proses pelaporannya, laba haruslah merupakan hasil penerapan aturan dan prosedur yang logis serta konsisten secara internal. Laba akuntansi didasarkan pada konsep seperti realisasi pendapatan dan konsep penandingan (*matching*) antara beban dengan pendapatan, maka umumnya dianggap bahwa kegiatan utama perusahaan dapat diukur dan dilaporkan dan juga kegiatan

perusahaan secara keseluruhan. Tujuan jangka panjang yang perlu dari konsep laba adalah bahwa konsep itu harus berhubungan dengan observasi dunia nyata. Laba juga harus dievaluasi berdasarkan dimensi perilaku. Salah satu ciri perilaku adalah kemampuan ramal yang berguna untuk meramalkan operasi perusahaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pendekatan kepemilikan akuntansi, laba bersih (*net income*) biasanya dianggap sebagai *net earnings* atau *net profits* yang diperuntukkan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Akan tetapi, terdapat kemungkinan munculnya berbagai alasan yang tepat bagi penyajian angka laba bersih yang menunjukkan laba bersih untuk kelompok penerima yang lebih luas atau lebih sempit. Tabulasi berikut menunjukkan beberapa konsep laba perusahaan perseroan yang diklasifikasi menurut pihak penerima laba.

Tabel 2.1. Klasifikasi Laba Bersih Menurut Pihak Penerima Laba

KONSEP LABA	CAKUPAN LABA	PIHAK PENERIMA LABA
Pertambahan nilai	Harga jual produk dikurangi harga pokok barang dan jasa yang diperoleh melalui transfer	Semua karyawan, pemilik, kreditor, dan pemerintah
Laba bersih perusahaan	Kelebihan pendapatan atas beban; semua keuntungan dan kerugian. Beban tidak mencakup beban bunga, pajak penghasilan, dan	Pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah

	pembagian laba yang sebenarnya.	
Laba bersih bagi investor	Seperti laba bersih perusahaan, tetapi sesudah dikurangi pajak penghasilan	Pemegang saham dan hutang jangka panjang
Laba bersih bagi pemegang saham	Laba bersih bagi investor dikurangi beban bunga dan pembagian laba	Pemegang saham (saham preferen dan biasa)
Laba bersih bagi pemilik ekuitas residu (<i>residual equity holders</i>)	Laba bersih bagi pemegang saham dikurangi dividen preferen	Pemegang saham biasa yang ada dan yang potensial kecuali jika pembayaran prioritas tidak dapat dipenuhi

Eldon S. Hendriksen (terj.), *Accounting Theory*, 4th Edition, Erlangga, Jakarta, 1982

Di dalam laporan keuangan terdapat dua jenis laba yang akan dilaporkan, laba kotor (*gross profit*), dan laba bersih (*net profit*). Laba kotor adalah pelaporan laba setelah pengurangan hasil usaha dengan harga pokok, sedangkan laba bersih adalah pelaporan laba setelah laba kotor dipengaruhi oleh biaya dan pendapatan operasional. Laba bersih inilah yang nantinya akan dikenai pajak penghasilan.

2.2. Konsep Manajemen Laba

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stockholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang

dilaporkan. Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus Scott (2000). Menurut Saiful (2002), mengungkapkan pendapat Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

Saiful (2002) mengungkapkan pendapat Wattz, Zimmerman (1986) bahwa tujuan yang akan dicapai oleh manajemen melalui manajemen laba meliputi : mendapat bonus dan kompensasi lainnya, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, menghindari pelanggaran perjanjian hutang, dan menghindari biaya politik. Healy dan Wahlen membagi motivasi yang mendasari manajemen laba ke dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Motivasi dari pasar modal yang dikumpulkan dengan retur saham. Beberapa penelitian memberi bukti adanya manajemen laba untuk tujuan pasar modal, seperti De Angelo (1998) memberikan bukti bahwa manajemen cenderung melaporkan labanya lebih rendah (*understate*) pada saat melakukan buy out, dan Teoh et al (1998a dan 1998b) dan Rangan (1998) melaporkan bahwa ketika dilakukan penawaran saham ke publik, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi (*overstate*).
2. Motivasi kontrol yang dapat berupa kontrak hutang Sweeny (1994) dan kontrak kompensasi manajemen Holthousen, Lacker, dan Sloan (1995).
3. Motivasi regulatory seperti yang dikemukakan Jones (1991), Cahen (1992), Guenter (1994), Naim dan Hartono (1996), dan Key (1997).

Scott (1997), juga menyampaikan adanya motivasi terjadi manajemen laba karena hal-hal berikut ini :

1. Bonus purpose : manajer yang memiliki inside information atas net income perusahaan bisa menaikkan bonus mereka dengan memaksimalkan laba perusahaan. Karena mereka mempunyai peran dalam penyediaan informasi laba perusahaan.
2. Political motivation : pada perusahaan yang cenderung monopolistik atau mengurangi laba yang dilaporkan karena ada public pressure yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan lebih ketat.
3. Taxation motivation : manajer bisa menurunkan laba untuk mengurangi pajak atas pendapatan.
4. Penggantian CEO : CEO yang mendekati pensiun atau pemberhentian kerja, cenderung memaksimalkan laba untuk menaikkan bonus atau memberi nilai positif kinerjanya agar tidak diberhentikan.
5. Penawaran umum perdana : manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam prospektus dengan harapan menaikkan harga saham perusahaan.

Menurut Scott (1997) ada beberapa tehnik dan pola pada manajemen laba, yaitu :

1. Taking a bath : digunakan selama masa reorganisasi. Jika manajer melaporkan kerugian, maka ia akan melaporkannya dalam jumlah besar, yang mengakibatkan laba akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat ditimpakan pada manajer lama jika ada penggantian.

2. Income minimization : digunakan selama periode dengan tingkat profitabilitas tinggi, sehingga jika periode depan laba turun drastis bisa diseimbangkan dengan porsi laba yang diambil periode sebelumnya.
3. Income maximization : digunakan untuk mendapatkan bonus.
4. Income smoothing : digunakan untuk meratakan laba yang dilaporkan dengan tujuan external reporting. Investor lebih memilih laporan laba yang stabil.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa manajemen laba berbeda dengan *fraud*. Keduanya memang dilakukan secara sengaja dan melalui proses manipulasi. Perbedaan pokok bahwa manajemen laba tidak berhubungan dengan penciptaan bukti-bukti palsu ataupun transaksi fiktif yang sifatnya melanggar hukum, sedangkan *fraud* berhubungan dengan hal-hal tersebut. Sebenarnya praktik manajemen laba tidak selalu berarti buruk karena jika tidak semua motivasi manajemen laba dikaitkan dengan perilaku oportunistik pihak manajemen tetapi sebaliknya dapat dilihat dari sudut pandang *efficient contract*.

Diasumsikan manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas harapan mereka yang berhubungan dengan gaji, kontrak hutang dan biaya politik. Karena itu sulit untuk membedakan apa yang melatarbelakangi pemilihan kebijakan akuntansi, apakah karena oportunistik atau efisiensi. Penelitian tentang ini pernah dilakukan oleh Christie dan Zimmerman (1994) yang meneliti besarnya peningkatan income dari hasil usaha perusahaan

terhadap pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat mengubah target. Hasilnya pengaruh pemilihan tersebut sangat kecil, alasan ini karena oportunitas lebih banyak.

Manajemen laba tampaknya memang fenomena yang sukar dihindari karena fenomena ini hanya dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar akrual disepakati sebagai dasar penyusunan laporan keuangan karena dasar akrual memang lebih rasional dan lebih adil dibandingkan dengan dasar kas. Pada dasarnya basis akrual dipilih dengan tujuan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif, yaitu laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sebenarnya.

Sayangnya, akrual yang ditujukan untuk menjadikan laporan keuangan yang sesuai dengan fakta ini dapat sedikit digerakkan (*tuned*) sehingga dapat mengubah angka laba yang dihasilkan. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan (*nondiscretionary accrual*) dan bagian akrual yang merupakan hasil rekayasa (*discretionary accrual*).

2.3. Teori Keagenan

Hubungan agency muncul ketika ada satu pihak yang membayar pihak lain untuk melakukan beberapa jasa dan mendelegasikan otoritas wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam konteks perusahaan, salah satu masalah agency yang muncul adalah pada hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer. Sebagai prinsipal, pemilik memberi tugas kepada manajer sebagai

agen untuk mengelola perusahaan agar nilai investasi yang ditanamkan pemilik dapat tambah seoptimal mungkin, pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk kesejahteraan diri dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedang agent termotivasi untuk memaksimalkan kebutuhan ekonomi dan psikologis, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Terdapat tiga hubungan keagenan menurut Watt dan Zimmerman (1990) :

- a. Antara manajemen dengan pemilik, manajemen berupaya menaikkan laba diperoleh dengan maksud agar bonus yang diperoleh akan meningkat.
- b. Antara manajemen dengan kreditur, manajer akan berupaya agar debt equity selalu positif. Bila rasionya negatif, maka perusahaan akan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi utang pada waktunya.
- c. Antara manajemen dengan pemerintah, hubungan ini berlaku bagi perusahaan yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat dengan cara mengurangi laba yang dilaporkan, maka pajak yang akan ditanggung perusahaan akan berkurang.

2.4. Dasar akrual dalam pencatatan arus kas

Metode-metode pengukuran laba rugi bersih menurut dasar akrual berhubungan dengan akibat-akibat finansial yang digunakan sebagai dasar pengukuran aktiva dan kewajiban. Dengan demikian, accrual basis net income dapat diukur berdasar historical cost, current exit value, expected exit value maupun present value.

Akuntansi dasar akrual juga dapat menyediakan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan aktivitas operasi sepanjang arus kas ini dapat diestimasi dengan tingkat kepastian yang memadai. Akuntansi dasar akrual membantu dalam memprediksikan arus kas masa depan karena melaporkan transaksi serta kejadian lainnya yang memiliki konsekuensi kas pada saat transaksi atau kejadian itu terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Dasar akrual memperkenankan untuk dicatat atau diakui efek yang signifikan dari transaksi-transaksi operasi pada saat atau dalam periode terjadinya transaksi dan tidak pada saat atau dalam periode terjadinya penerimaan atau pengeluaran kasnya. Dengan dasar akrual, pendapatan diakui pada saat atau dalam periode pendapatan itu diperoleh atau direalisasikan tanpa memperhatikan kapan terjadinya penerimaan kas, dan beban atau biaya pada saat atau dalam periode beban atau biaya itu terjadi terlepas dari waktu terjadinya pengeluaran kas.

Konsep akrual dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *discretionary accrual* dan *indiscretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas dan diatur oleh kebijakan manajemen. Sedangkan *nondiscretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang wajar yang tunduk pada suatu standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. *Non discretionary accrual* ini apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar).

2.5. Undang-Undang Perpajakan

Penentuan pengambilan keputusan politik mengenai kebijakan perpajakan adalah rakyat sendiri melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan negara yang diwakili oleh eksekutif. Hasil kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mencegah salah arti terhadap pemungutan pajak kepada rakyat yang dipungut dengan tanpa kontra prestasi (imbalan) tidak dianggap sebagai perampasan harta rakyat oleh negara, karena sudah disetujui oleh rakyat sendiri. Pembuatan undang-undang ini bertujuan untuk mengikat semua orang agar mematuhi dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan mengenai rakyat mana yang harus membayar sebagian harta kekayaannya untuk negara dalam perpajakan dinamakan ketentuan mengenai Subjek Pajak atau Wajib Pajak. Ketentuan mengenai dasar-dasar rakyat harus membayar pajak dinamakan ketentuan mengenai Objek Pajak. Ketentuan mengenai besarnya harta kekayaan yang harus dikenai pajak dan dibayarkan oleh rakyat dinamakan ketentuan mengenai Tarif Pajak dan cara penghitungannya. Ketentuan mengenai kapan rakyat harus membayar pajak dinamakan ketentuan mengenai saat terutang pajak atau saat pemajakan. Sedangkan ketentuan mengenai tata cara pemajakan dan penagihannya dinamakan ketentuan mengenai tata cara pemajakan atau prosedur pemajakan dan penagihan pajak.

Pola pemajakan di berbagai negara berbeda-beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya, dan sejarah. Rasio penerimaan pajak di negara berkembang

sekitar 10, 15, sampai 20% dari pendapata domestik bruto, sedangkan di negara maju lebih dari 30%. Walaupun hampir tidak ada struktur pemajakan yang optimal, namun sistem pajak yang kurang tepat desainnya akan berfungsi kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa implikasi seperti :

1. Ketidakcukupan penerimaan,
2. Distorsi yang memperlemah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi,
3. Kekurangadilan pembagian beban pajak,
4. Masalah administratif (penggelapan dan penyelundupan, serta penyalahgunaan wewenang).

Di Indonesia, masalah perundang-undangan perpajakan telah terjadi reformasi sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1983, tahun 1994, tahun 1997, dan tahun 2000. Tetapi untuk pajak penghasilan hanya terjadi tiga kali. Pada tahun 1997 tidak ada reformasi terhadap pajak penghasilan, karena pada tahun ini hanya diperkenalkan jenis pajak baru serta pengaturan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Undang- undang tentang pajak penghasilan yang mengalami perubahan dalam reformasi perpajakan adalah UU No 7 Tahun 1983. Pada tahun 1994 dikeluarkan UU No 10 Tahun 1994 sebagai perubahan pertama atas UU No 7 Tahun 1983, kemudian tahun 2000 dikeluarkan UU No 17 Tahun 2000 sebagai perubahan kedua ata UU No 7 Tahun 1983.

2.6. Pajak Penghasilan

Mempelajari Pajak Penghasilan (PPh) berarti mempelajari semua ketentuan material dan ketentuan formalnya. Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan sebagian besar dimuat dalam UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2000. Sedangkan ketentuan formal mengenai Pajak Penghasilan sebagian dimuat dalam UU PPh, dan sebagian lagi dimuat dalam UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2000. Peraturan perundang-undangan perpajakan dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut ditunjukkan hasil perubahan tarif pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.2 Perbedaan Tarif UU PPh tahun 1983, 1994, dan 2000 untuk Wajib Pajak Badan

UU No 7 Tahun 1983	UU No 10 Tahun 1994	UU No 17 Tahun 2000
PKP s/d 10.000.000 : 15%	PKP s/d 25.000.000 : 10%	PKP s/d 50.000.000 : 10%
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 : 25%	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 : 15%	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 : 15%

PKP diatas 50.000.000 : 35%	PKP diatas 50.000.000 : 30%	PKP diatas 100.000.000 : 30%
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Sumber : UU No 7 Th 1983, UU No 10 Th 1994, UU No 17 Th 2000

Tabel 2.3 Perbedaan Tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak Untuk Wajib Pajak Pribadi

UU No 7 Tahun 1983	UU No 10 Tahun 1994	UU No 17 Tahun 2000
		PKP s/d 25.000.000 : 5%
	PKP s/d 25.000.000 : 10%	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 : 10%
PKP s/d 10.000.000 : 15%	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 : 15%	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 : 15%
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 : 25%		PKP diatas 100.000.000 s/d 200.000.000 : 25%
PKP diatas 50.000.000 : 35%	PKP diatas 50.000.000 : 30%	PKP diatas 200.000.000 : 35%

Sumber : UU No 7 Th 1983, UU No 10 Th 1994, UU No 17 Th 2000

Perubahan UU Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara umum, yaitu keadilan, efisiensi administrasi, produktivitas penerimaan negara, dan tetap mempertahankan sistem

self assessment. Oleh karena itu arah dan tujuan penyempurnaan UU Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, dengan dilakukannya perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pengecualian atau pembatasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan antara WP orang pribadi dan WP badan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional terhadap masing-masing golongan wajib pajak.
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, dengan mempertahankan sistem *self assessment* tetapi dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang melakukan usaha perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan, tetapi untuk Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.6.1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan ini perlu diungkapkan untuk mengetahui siapa saja atau golongan apa saja yang dikenai dan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Pajak Penghasilan dikenakan pada Subjek Pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Rakyat yang membayar pajak penghasilan di Indonesia bukan saja rakyat yang menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di negara lain jika dia mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti halnya menerima penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Pajak penghasilan dalam pengenaannya, titik perhatian yang utama adalah keadaan atau status subjek yang dikenai pajak, kemudian objek pajaknya. Keadaan atau status subjek yang dikenai pajak menentukan cara penghitungan pajak dan besarnya pajak terutang oleh subjek bersangkutan. Perhatian pada status subjek pajak itu diperlukan demi mencapai keadilan dan pemerataan atas beban pajak, dan dimaksudkan agar beban pajak tersebut tetap melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, tidak dilimpahkan kepada pihak lain. Yang menjadi Subjek Pajak atas penghasilan adalah :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak tidak

melihat batasan umur, jenjang sosial ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan.

2. Badan

Yang disebut dengan badan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Dalam peraturan perpajakan, setiap unit tertentu dari badan Pemerintah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan tetap dianggap sebagai Subjek Pajak, kecuali memenuhi kriteria berikut :

- a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD,
- c. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah,
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan merupakan Subjek Pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris untuk dikenai pajak. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kepastian hukum kepada siapa penghasilan dari warisan tersebut akan dikenai pajak. Warisan sebagai Subjek Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif tetap

dapat dilaksanakan, sehingga hak negara atas sebagian dana masyarakat tidak terputus karena kematian seseorang.

Dalam menentukan Orang Pribadi atau Badan mana saja yang dijadikan sasaran Undang-undang pajak untuk membayar pajak di Indonesia, atau rakyat yang mana yang menjadi Subjek Pajak di Indonesia, pembuat Undang-undang harus berpijak pada hak yuridis atau ruang lingkup kuasa hukum pajak dari suatu negara. Asas hukum mengatakan bahwa suatu hukum hanya berlaku di dalam wilayah negara yang bersangkutan dan hukum mengenai status dan wewenang seseorang mengikuti hukum dari negara di mana orang itu berada. Demikian dengan hukum pajak. Hukum pajak suatu negara hanya berlaku pada wilayah di negara itu. Tidak boleh melampaui batas negara. Orang yang tinggal atau berdiam di suatu negara harus tunduk pada hukum pajak yang berlaku di negara tempat dia berada. Walaupun demikian, seseorang atau suatu badan yang berada di luar wilayah suatu negara bisa juga dikenai pajak di negara tersebut jika memenuhi salah satu dari dua syarat berikut :

1. Harus ada hubungan ekonomis dengan negara yang bersangkutan, seperti menerima penghasilan, mempunyai harta yang tak bergerak, atau menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT).
2. Harus ada hubungan kenegaraan dengan negara yang bersangkutan.

2.6.2. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1), pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan menurut perspektif perpajakan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Penghasilan yang merupakan objek pajak.
2. Penghasilan yang dikenai pajak secara final.
3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Secara akuntansi, penghasilan berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan barang, imbalan atas jasa, bunga dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan merupakan kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan) yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan. Keuntungan misalnya dapat berasal dari pengalihan aktiva perusahaan.

Dalam pengertian penghasilan terdapat 5 elemen. *Pertama*, pengertian penghasilan diberikan berdasar aspek ekonomi (bukan akuntansi) dengan menyebut bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis. *Kedua*, istilah “yang diterima atau yang diperoleh” menunjukkan saat pengakuan, yaitu diakui pada saat diterima. *Ketiga*, istilah “baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia” menunjukkan cakupan geografis dari sumber penghasilan yang mencakup basis global tanpa melihat letak sumber penghasilan. *Keempat*, istilah “yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak” menunjuk pada pemanfaatan penghasilan apakah untuk menjaga kelangsungan eksistensi Wajib Pajak (konsumsi) maupun untuk ditabung, atau investasi dan menambah kekayaan Wajib Pajak (konsumsi masa mendatang). *Kelima*, istilah “dengan nama dan dalam bentuk apapun” menegaskan bahwa UU PPh menganut konsep material bukan formal (substansi mengungguli bentuk) dalam mengkategorikan apakah suatu item itu merupakan penghasilan atau bukan. Walaupun Wajib Pajak tidak menyebutnya sebagai penghasilan, namun kalau sumber daya tersebut memenuhi unsur-unsur definisi dalam ketentuan pajak akan dianggap sebagai penghasilan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabung untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu segmen usaha atau kegiatan mendapatkan kerugian, maka kerugian

tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.

2.7. Hubungan Manajemen Laba dengan Rekayasa Akrual terhadap Pajak

Dengan adanya perubahan Undang-undang Perpajakan yang menurunkan tarif pengenaan pajak atas penghasilan, maka manajemen laba yang mempunyai wewenang atas informasi laba perusahaan dapat melakukan rekayasa dengan menggeser laba dari periode satu ke periode lainnya. Dalam hal ini manajemen laba menggunakan akrual yang mempunyai sifat dapat dirubah atau digeser pengakuan dan pelaporan transaksinya untuk mengubah perolehan laba dari periode sebelum berlakunya undang-undang ke periode undang-undang itu mulai diberlakukan, atau bisa juga dengan menggeser beban yang dapat mengurangi laba ke periode sebelum berlakunya pajak, sehingga dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dan akan dikenai pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu pernah dilakukan oleh Setiawati (2000). Penelitian ini menguji apakah dengan adanya perubahan tarif pajak yang diundangkan tahun 1994 dan diberlakukan mulai tahun fiskal 1995 direspon oleh manajemen dengan merekayasa akrual untuk meringankan beban pajak penghasilan.

Penelitian tentang manajemen laba pernah dilakukan oleh Healy (1995) yang membuktikan bahwa sebagian manejr berusaha untuk memaksimumkan

bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual. Jones (1991) membuktikan bahwa manajer berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah berkaitan dengan pemberian proteksi impor. Ada juga manajer yang terbukti berusaha meminimalkan pajak yang mereka bayarkan, dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah (Dhaliwal, Frankel, dan Trezevant (1994); Guenther (1994); Cloyd, Pratt, dan Stock (1996)). Di lain pihak, Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stockholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) mengungkapkan bahwa manajemen laba dilakukan berdasarkan tiga hipotesis, yaitu bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis atau leverage hypothesis, dan political hypothesis. Sedangkan penelitian untuk mengukur manajemen laba dilakukan oleh Bowman dan Navisi (1998) yang menyatakan bahwa manajemen laba diukur dengan menggunakan akrual diskresionari untuk memberi penekanan pola kebijakan non metoda akuntansi dan telah diterima secara luas dalam akuntansi.

Di Indonesia, penelitian manajemen laba ini pernah dilakukan oleh Slamet Sugiri dan Syukri Abdullah (2003) yang mengungkapkan bahwa manajemen laba dapat memanipulasi laba dengan cara baik secara langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pendanaan, dan investasi, maupun dalam

bentuk pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam prinsip akuntansi berterima umum.

Hi: Perubahan Undang-undang perpajakan memotivasi manajemen laba melakukan rekayasa akrual terhadap labanya untuk meminimalkan beban pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *event study* yang memanfaatkan adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang diundangkan pada 2 Agustus 2000 dan diberlakukannya per 1 Januari 2001. Perubahan UU PPh tersebut antara lain mencakup adanya perubahan tarif dan lapisan kena pajak untuk wajib pajak pribadi dan adanya perubahan lapisan kena pajak untuk wajib pajak badan. *Event* ini diperlakukan sebagai *event* yang dapat memberikan motivasi bagi manajemen untuk melakukan penundaan pelaporan laba dengan harapan akan meminimalkan pajak yang dibebankan.

3.2. Spesifikasi Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kumpulan data sasaran atau kumpulan mengenai suatu masalah secara keseluruhan. Dalam penelitian ini perusahaan yang dipilih sebagai populasi adalah perusahaan manufaktur. Penulis berfokus pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur industri yang mayoritas di BEJ. Hampir semua perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang aktif di BEJ.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek dimana sifat sampel penelitian ini adalah homogen. Pengambilan sample untuk penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode pengambilan sample non probabilita yang menyesuaikan diri dengan kriteria tertentu. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Sampel perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang menerbitkan laporan arus kas mulai tahun 1999, 2000, dan 2001.
- b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode 1999, 2000, dan 2001.
- c. Perusahaan tersebut melaporkan adanya laba pada saat periode pengamatan 2000, dan 2001.

3.3. Jenis Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Wajib Pajak Badan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk periode 1999, 2000, dan 2001.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Total akrual yaitu selisih antara laba bersih perusahaan i pada tahun t dengan kas dari operasi perusahaan i pada tahun t

2. *Nondiscretionary accrual* yaitu tingkat laba yang wajar yang tidak direkayasa manajemen
3. *Discretionary accrual* yaitu tingkat laba yang tidak normal yang merupakan laba rekayasa dari pihak manajemen
4. Total aktiva perusahaan
5. Total pendapatan perusahaan
6. Total aktiva tetap perusahaan

Untuk membedakan atau memisahkan laba akrual yang abnormal dengan laba akrual yang normal melibatkan variabel pengubah yaitu selisih pendapatan tahun t dengan tahun $t-1$.

3.4. Analisis dan Pengolahan Data

Penelitian ini akan menguji apakah benar satu tahun sebelum penerapan peraturan perpajakan yang baru, perusahaan akan menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya untuk menunda pembayaran pajak atau menggeser pengenaan beban pajak dari tahun 2000 ke tahun 2001. Untuk mengevaluasi hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Perhitungan tingkat akrual yang tidak normal meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Menghitung total akrual. Total akrual didapat dengan formulasi sebagai berikut :

$$TA_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta CL_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} - Dep_{it}) / A_{it-1} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

CA_{it} = Aktiva lancar perusahaan i pada tahun t

CL_{it} = Utang lancar perusahaan i pada tahun t

$Cash_{it}$ = Kas dan ekuivalen kas perusahaan i pada tahun t

STD_{it} = Utang jangka panjang perusahaan i pada tahun t

Dep_{it} = Akumulasi penyusutan perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

- b. Menentukan tingkat akrual yang normal. Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan estimasi akrual Jones yang akan memisahkan *discretionary accrual* dengan *nondiscretionary accrual*, yaitu :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_1 (\Delta REV_{it} / A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

ε_{it} = error term perusahaan i pada tahun t

Perubahan pendapatan $\beta_1(\Delta REV_{it}/A_{it-1})$ dimasukkan ke dalam model estimasi tersebut untuk mengendalikan perubahan dalam *nondiscretionary accrual* yang disebabkan oleh perubahan kondisi. Pendapatan digunakan sebagai kontrol terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran obyektif dari operasi perusahaan sebelum manipulasi manajer. Sedangkan $\beta_2(PPE_{it}/A_{it-1})$ merupakan bagian dari total akrual yang berhubungan dengan biaya depresiasi yang *nondiscretionary*.

d. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal.

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - [\alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/A_{it-1})] \dots\dots(2)$$

Dimana :

DA_{it} = Discretionary akrual perusahaan i pada tahun t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

Pada dasarnya dalam total akrual terkandung nilai *discretionary accrual* dan *nondiscretionary accrual*. Seperti yang ditunjukkan formulasi berikut :

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

Tanpa adanya manajemen laba, maka *discretionary accrual* = nol. Nilai tersebut mengindikasikan tingkat akrual hasil manajemen laba. Rekayasa menaikkan laba diindikasikan dengan nilai *discretionary accrual* yang positif, sedangkan rekayasa menurunkan laba diindikasikan dengan nilai *discretionary accrual* yang negatif.

3.5. Pengujian Hipotesis

Ada dua analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian terhadap kemungkinan motivasi perusahaan untuk menunda laba karena adanya penurunan tariff pajak pada satu periode sebelum tariff baru berlaku :

1. Hipotesis pertama untuk mengetahui apakah tingkat akrual yang tidak normal (*discretionary accrual*) tersebut tidak sama dengan nol. Jika terbukti, maka ada indikasi perusahaan menunda pelaporan laba dan menggeser laba tersebut ke tahun berlakunya tarif pajak yang baru.

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji t untuk tingkat *discretionary accrual* tahun 2000 dan 2001.

2. Hipotesis kedua untuk mengetahui apakah tingkat akrual abnormal sebelum tariff pajak berlaku akan lebih rendah daripada tingkat akrual abnormal setelah berlakunya tarif pajak yang baru. Apabila tingkat akrual abnormal tahun 2000 lebih rendah daripada tahun 2001, maka perusahaan tersebut menggeser labanya ke periode berikutnya. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan uji beda rata-rata.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

Perusahaan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go publik di BEJ yang menerbitkan laporan arus kas mulai tahun 1999-2001, dan perusahaan tersebut melaporkan adanya laba di tahun penelitian 2000-2001. Karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenai pajak penghasilan. Jumlah perusahaan yang go public dan aktif pada tahun 2000-2001 terdiri dari 156 perusahaan. Tetapi hanya 78 perusahaan yang memenuhi syarat diadakannya penelitian. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan penilaian akrual perusahaan sehingga akan diketahui tingkat akrual normal dan tidak normalnya. Langkah analisis yang akan diambil meliputi :

1. Menghitung total akrual perusahaan
2. Menentukan tingkat akrual normal berdasarkan nilai total akrual yang dimasukkan ke dalam persamaan :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it},$$

agar diperoleh koefisien α , β_1 , dan β_2 .

3. Menentukan tingkat akrual dengan memasukkan nilai koefisien yang sudah diperoleh dari persamaan akrual normal.

Data laporan keuangan tahun 2000 dengan 2001 sifatnya berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan, sehingga analisis akan dilakukan dengan membandingkan nilai yang sudah diuji dengan menggunakan uji t dan uji beda dua rata-rata.

4.2. Model Estimasi Tingkat Akrual Normal

Langkah pertama untuk mencari ukuran akrual normal adalah mencari total akrual terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus :

$$TA_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta CL_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} - Dep_{it}) / A_{it-1}$$

Setelah diperoleh nilai total akrual, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam persamaan tingkat akrual normal, yang dapat dirumuskan dengan model estimasi akrual Jones sebagai berikut:

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_1 (\Delta REV_{it} / A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

Untuk mendapatkan nilai akrual yang normal, peneliti menggunakan aktiva tetap dan perubahan pendapatan yang diukur dengan menggunakan total aktiva tahun sebelumnya. Sedangkan untuk mengukur parameter nilai α , β_1 , dan β_2 digunakan metode regresi terhadap tingkat akrual yang normal tersebut. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.

Estimasi Koefisien Akrua Normal

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	-1.676	1.179		-1.421	0.157
DREV 00	2.060E-06	0.000	0.018	.0207	0.837
PPE 00	4.120E-07	0.000	0.028	0.319	0.750

Dari regresi yang dilakukan terhadap akrua normal, maka didapatkan nilai -1.676, 2.060E-06, dan 4.120E-07 sebagai parameter koefisien α , β_1 , dan β_2 . Sehingga model untuk mengestimasi akrua yang normal dapat ditulis ulang menjadi sebagai berikut :

$$TA_{it}/A_{it-1} = -1.676 + 2.060E-06(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + 4.120E-07(PPE_{it}/A_{it-1})$$

Model tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memisahkan tingkat akrua yang tidak normal dengan tingkat akrua normal. Tingkat akrua yang tidak normal untuk tahun 2000 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - [-1.676 + 2.060E-06(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + 4.120E-07(PPE_{it}/A_{it-1})]$$

4.3. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis

Ada dua analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis, yaitu dengan menggunakan uji t dan untuk hipotesis kedua menggunakan uji beda dua rata-rata. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran apakah

manajemen laba memanfaatkan penurunan tarif pajak dengan menunda pelaporan laba (menurunkan akrual) pada satu periode sebelum tarif berlaku ke periode berlakunya tarif baru. Pengujian dilakukan pada tingkat *discretionary accrual* atau tingkat akrual yang tidak normal untuk mengetahui perbedaan peniaian akrual dari tiap periode.

4.3.1. Uji t

Pengujian nilai t dilakukan untuk mengevaluasi apakah tingkat akrual yang tidak normal tersebut benar-benar berbeda dari nol. Jika terbukti, maka ada indikasi perusahaan menunda pelaporan laba dan menggeser laba tersebut ke tahun berlakunya tarif baru. Hal ini nantinya akan ditunjukkan dengan nilai t tingkat akrual abnormal tahun 2000 akan bernilai negatif dan nilai t tingkat akrual abnormal tahun 2001 akan bernilai positif.

Tabel 4.2

Statistik Diskriptif

Discretionary Accrual Periode 2000-2001

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DA 00	78	-0.2064152	8.39128762	0.95012623
DA 01	78	0.2064152	16.90164016	1.91373390

Hasil Pengujian Nilai t

Tahun	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
2000	-0.217	77	.829	-0.2064152	-2.0983582	1.6855278
2001	0.108	77	.914	0.2064152	-3.6043158	4.0171462

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai t untuk *discretionary accrual* tahun 2000 sama dengan -0.217, dengan tingkat signifikansi sama dengan Sig. (2-tailed) 0.829. Begitu juga dengan nilai t untuk *discretionary accrual* tahun 2001. nilai t tahun 2001 sama dengan 0.108, dengan tingkat signifikansi Sig (2-tailed) 0.914. Ini berarti bahwa terdapat tanda-tanda pergeseran pengakuan laba dari tahun 2000 ke tahun 2001 yang dilakukan oleh manajemen laba. Karena nilai t untuk tahun 2000 bernilai negatif dan nilai t tahun 2001 bernilai positif. Tetapi dengan tingkat signifikansi tahun 2000 sebesar 0.829 dan tahun 2001 sebesar 0.914 yang keduanya lebih besar daripada 5%, maka menunjukkan data empiris tidak mendukung hipotesis yang diajukan.

4.3.2. Uji Beda Dua Rata-Rata

Uji beda dua rata-rata berpasangan digunakan untuk membandingkan tingkat *discretionary accrual* untuk tahun sebelum dan sesudah berlakunya tarif pajak yang baru. Jika ditemukan adanya pergeseran akrual atau penundaan pelaporan laba maka akan ditunjukkan dengan lebih rendahnya tingkat *discretionary accrual* tahun 2000 dibandingkan dengan tingkat *discretionary accrual* tahun 2001.

Berikut disajikan tabel hasil uji beda dua rata-rata

Tabel 4.3
Statistik Diskriptif

Discretionary Accrual Periode 2000-2001

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DA 00	78	-0.2064152	8.39128762	0.95012623
DA 01	78	-1.2292735	16.90468204	1.91407832

Hasil Pengujian Beda Dua Rata-Rata

Mean	Std.Deviation	Std. Error Mean	95 % Confidence Interval of the Difference		T	df	Sig. (2-tailed)
			Lower	Upper			
1.0228583	20.58067147	2.33030217	-3.6173661	5.6630827	0.439	77	0.662

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *discretionary accrual* tahun 2000 sebesar -0.2064152 dan nilai *discretionary accrual* tahun 2001 sama dengan -1.2292735. Nilai t untuk uji beda dua rata-rata sebesar 0.439 dengan tingkat signifikansi sebesar Sig.(2-tailed) 0.662. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata tidak menunjukkan adanya perbedaan antara tingkat *discretionary accrual* tahun 2000 dengan tingkat *discretionary accrual* tahun 2001, karena nilai *discretionary accrual* tahun 2000 lebih besar daripada tahun 2001. Hal ini dapat diasumsikan bahwa perusahaan tidak menunda pelaporan laba tahun 2000 dan menggeser pelaporannya pada tahun 2001 saat berlakunya tarif pajak yang baru dalam merespon diundangkannya Undang-Undang Perpajakan yang baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan Undang-undang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 yang mengubah lapisan dan tarif kena pajak untuk wajib pajak badan tidak direspon oleh wajib pajak badan yang bersangkutan untuk melakukan manajemen laba melalui rekayasa *discretionary accrual* dengan motivasi untuk menurunkan tingkat pengenaan pajak atas laba perusahaan. Ternyata rentang waktu antara ditetapkannya Undang-undang perpajakan tahun 2000, yaitu 2 Agustus 2000 sampai dengan efektif diberlakukannya Undang-undang perpajakan tersebut, yaitu 1 Januari 2001 yang berjarak 5 bulan tidak digunakan oleh manajemen laba untuk merekayasa akrual. Seperti yang disampaikan Setiawati (2000) bahwa rentang waktu ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang pajak tahun 1994 hanya 50 hari sehingga menjadikan alasan tidak terbuktinya rekayasa akrual dengan terlalu pendeknya rentang waktu penetapan sampai dengan pemberlakuan efektif Undang-undang pajak tahun 1994, sehingga tidak memberikan waktu yang cukup bagi manajemen laba untuk merekayasa akrual. Beberapa metode rekayasa penurunan laba dimungkinkan membutuhkan waktu lebih dari 50 hari.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam jumlah sampel penelitian yang digunakan hanya 78 perusahaan dari total 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, sehingga sangat kurang apabila digunakan sebagai generalisasi penelitian. Minimumnya jumlah sampel ini disebabkan batasan masalah yang telah diajukan sebagai syarat suatu perusahaan diteliti laporan keuangannya berdasar data-data yang diperlukan untuk penelitian. Keterbatasan berikutnya adalah pengambilan sampel wajib pajak Badan yang hanya mengalami perubahan lapisan penghasilan kena pajak, sehingga apabila laba pada size yang besar maka tidak akan ada manfaatnya apabila menggeser penghasilan ke periode berikutnya.

5.3. Saran Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya meneliti perubahan tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan dengan berlakunya Undang-Undang Perpajakan yang baru dan pengaruhnya terhadap manajemen laba, apakah manajemen akan merespon Undang-undang dengan melakukan rekayasa menggeser labanya dari periode sebelum berlakunya Undang-undang ke periode setelah diberlakukannya Undang-undang perpajakan. Karena adanya perubahan Undang-undang tersebut tarif pajak penghasilan mengalami penurunan prosentase tarif pengenaan pajak. Akan tetapi, pergeseran tarif tersebut tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap laba perusahaan. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya

akan lebih tepat apabila objek penelitian atas perubahan Undang-undang tersebut dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, karena tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi mengalami penurunan prosentase yang cukup besar dan tentunya akan mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap penghasilan yang akan diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Daftar Pustaka

- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield (terj.), *Akuntansi Intermediate*, Edisi 10, Erlangga, Jakarta, 2002
- Drs. Harnanto M.soc.Sc, Akt, *Akuntansi Keuangan Menengah*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2002
- Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan: Berdasarkan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2000*, Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Hendriksen, Eldon S.(terj.), *Accounting Theory*, 4th Edition, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian (Manajemen dan Akuntansi)*, Edisi 3, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1987
- J. Supranto, M.A, *Statistik : Teori dan Aplikasi Jilid 2*, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta, 2001
- Jurnal Akuntansi FE UII, *Pedoman Penulisan Skripsi*
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Penghasilan: Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Ekonisia Yogyakarta, 2000
- Markus, Muda, *Pajak Penghasilan: Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Sekar Mayangsari, *Manajemen Laba dan Motivasi Manajemen*, Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi, Vol 1, No. 2, Agustus 2001
- Setiawati, *Rekayasa Akrual Untuk Meminimalkan Pajak*, Simposium Nasional Akuntansi IV, 2001
- Singgih, *SPSS 11.5*, Edisi Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003

	STD			Depr			A			REV			PPE		
	1999	2000	2001	2000	2001	2001	1999	2000	2000	1999	2000	2001	2000	2001	2001
1	17.036	10.878	16.248	127.175	171.388	216.845	341.018	51.292	72.333	99.005	186.353	289.204			
2	67.486	69.526	18.642	67.861	80.617	305.625	386.524	98.915	129.910	149.593	166.578	160.807			
3	32.899	30.087	17.453	42.685	51.161	134.848	186.774	173.535	220.463	320.326	43.738	54.805			
4	2.590.911	4.901.113	2.603.359	1.499.072	1.809.394	10.637.680	12.554.630	3.681.727	3.740.643	3.868.523	5.203.971	5.595.590			
5	16.157	16.533	225.850	139.482	155.353	410.704	433.607	160.265	232.391	254.522	254.834	259.917			
6	6.802	11.648	12.136	84.832	102.438	388.983	542.867	174.053	232.879	355.628	125.853	252.434			
7	16.422	23.915	27.225	50.019	66.759	230.839	340.257	53.155	93.616	89.243	172.995	235.587			
8	100.148	105.895	318.142	49.793	70.282	698.624	707.021	63.678	79.948	98.218	410.875	551.494			
9	38.599	16.372	21.643	97.267	110.123	874.736	812.466	401.908	394.500	379.556	192.506	179.069			
10	139.576	169.737	191.400	1.062.486	1.212.235	8.076.916	10.843.195	3.751.286	4.127.461	4.450.998	1.626.388	2.191.965			
11	1.681.910	2.483.207	2.406.780	628.032	777.778	6.492.685	8.524.815	2.696.511	3.097.130	4.072.685	1.948.528	1.942.825			
12	24.754	24.503	21.490	0	0	171.523	210.418	59.198	76.101	60.507	97.784	126.562			
13	170.001	235.405	242.534	54.691	62.854	346.693	514.988	67.457	125.138	101.342	115.014	138.243			
14	20.149	15.091	10.676	174.703	197.685	319.931	317.093	57.548	36.790	19.109	145.550	176.000			
15	0	0	0	5.298	5.808	18.334	28.075	9.996	18.194	16.681	3.849	3.759			
16	361.203	291.882	226.143	240.779	276.957	723.492	802.911	156.917	140.548	103.993	407.219	392.617			
17	2.274	2.688	3.401	17.194	21.361	176.188	250.405	17.563	12.240	813	36.899	35.943			
18	671.053	531.872	472.447	201.137	253.024	1.253.874	1.674.716	123.372	81.008	111.297	651.920	610.022			
19	1.416.123	1.495.745	1.717.040	2.027.336	2.466.682	4.125.256	5.541.400	557.109	710.097	642.824	3.280.857	3.490.583			
20	24.004	22.918	24.317	26.112	30.747	94.502	115.784	30.201	41.064	48.660	22.527	24.090			
21	19.121	445.000	272.000	4.749	6.584	20.609	45.605	5.569	9.992	22.648	6.988	9.878			
22	0	64.570	58.075	24.459	26.496	146.414	175.689	39.374	66.104	51.420	29.468	30.679			
23	28.000	4.764	17.299	12.598	19.832	118.164	208.206	24.527	24.483	17.942	74.124	87.647			
24	4.691	32.855	23.865	56.178	68.873	182.177	280.096	35.754	49.966	42.431	112.334	153.507			
25	0	0	74.000	2.441	1.377	14.148	19.473	11.534	9.205	17.141	1.329	11.785			
26	2.931	196.642	196.612	50.471	65.251	596.022	700.431	152.606	196.066	211.823	144.311	182.757			
27	858.177	69.721	954.218	679.469	815.897	1.681.127	2.048.581	292.962	327.635	400.573	944.375	953.213			
28	247.000	151.000	6.167	20.845	22.029	108.105	137.239	29.865	24.949	24.346	11.234	10.415			
29	329.000	321.000	461.000	10.416	11.743	54.736	58.399	21.439	15.992	14.185	11.585	11.617			
30	1.945	1.731	747.000	37.264	40.656	117.833	151.811	42.645	30.062	37.818	55.257	54.461			
31	63.687	59.619	31.869	58.989	62.733	226.918	259.212	57.593	54.960	49.677	17.249	17.681			
32	32.956	37.816	34.248	26.337	42.656	175.151	220.377	16.627	23.800	11.578	176.350	179.734			
33	4.853	11.039	19.039	54.485	62.793	117.907	164.391	45.413	51.871	73.751	45.453	71.146			

	Ca		Ci		Cash	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000
34 PT Dynaplast Tbk	119.341	137.122	137.494	110.979	170.482	40.219
35 PT Fatrapolindo Nusa Industri Tbk.	47.946	66.724	85.404	64.114	66.325	11.629
36 PT Igar Jaya Tbk.	114.023	141.351	138.525	92.771	110.915	17.213
37 PT Lapindo Packaging Tbk.	2.337	6.379	15.217	99.266	10.018	417.000
38 PT Plastpack Prima Industri Tbk.	288.000	4.510	12.250	5.493	7.552	813.000
39 PT Siwani Makmur Tbk.	49.403	63.896	25.465	14.907	8.115	8.271
40 PT Summitplast Interbenua Tbk.	46.962	112.151	62.983	79.687	80.099	29.659
41 PT Semen Gresik Tbk.	1.734.995	2.274.954	3.999.054	1.182.146	3.185.261	768.950
42 PT Alumindo Light Metal Industry Tbk.	404.797	488.953	479.065	153.446	364.694	2.019.783
43 PT Betonjaya Manunggal Tbk.	3.803	4.364	13.269	13.761	12.985	23.908
44 PT Citra Tubindo Tbk.	231.911	287.280	332.440	52.157	67.828	681.000
45 PT Lion Metal Works Tbk.	65.552	76.532	73.122	20.268	14.348	150.023
46 PT Pelangi Indah Canindo Tbk.	74.280	66.641	66.385	499.136	468.729	47.110
47 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	356.236	428.475	507.220	346.474	530.377	7.454
48 PT Kedaung Indah Can Tbk.	51.041	70.974	75.977	26.487	29.460	113.605
49 PT Arwana Citramulia Tbk.	26.782	36.225	36.895	40.863	41.798	5.088
50 PT Komatsu Indonesia Tbk.	393.146	424.600	408.729	37.979	57.128	6.995
51 PT Sumi Indo Kabel Tbk.	154.390	189.344	189.941	41.950	79.688	99.994
52 PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk.	369.737	241.471	293.554	841.588	278.262	33.578
53 PT Astra Graphia Tbk.	524.082	430.322	414.419	213.236	181.307	47.904
54 PT Metrodata Electronics Tbk.	131.820	287.334	399.264	234.577	230.543	102.054
55 PT Multi Agro Persada Tbk.	41.678	63.416	34.353	103.119	167.329	93.234
56 PT Multipolar Corporation Tbk.	76.268	174.324	303.323	33.126	23.009	153.170
57 PT Andhi Candra Automotive Products Tbk.	28.396	66.389	78.445	348.553	510.520	19.064
58 PT Astra Otoparts Tbk.	742.111	1.003.573	965.088	9.059	10.415	12.848
59 PT Branta Mulia Tbk.	530.330	821.663	786.341	803.798	485.063	9.493
60 PT Goodyear Indonesia Tbk.	194.130	218.431	188.872	73.208	27.766	306.856
61 PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	307.997	344.700	440.154	145.784	375.947	131.865
62 PT Intraco Penta Tbk.	337.191	425.141	594.581	99.500	269.271	23.081
63 PT Prima Alloy Steel Universal Tbk.	217.827	276.623	273.277	124.100	23.959	59.371
64 PT Selamat sempurna Tbk.	156.127	253.605	270.417	328.881	338.972	5.799
65 PT Sugi Samapersada Tbk.	7.960	34.350	31.836	6.937	62.461	3.700
66 PT Tunas Ridean Tbk.	243.186	633.150	910.651	147.929	542.413	31.803
						180.000
						572.000
						37.742
						27.713

	STD			Depr			A			REV			PPE		
	1999	2000	2001	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	
34	25.721	57.096	40.163	109.950	136.004	303.730	402.782	104.846	53.831	90.150	186.721	53.831	186.721	266.998	
35	84.911	53.914	36.779	59.776	77.652	168.687	224.729	59.865	31.082	55.573	154.932	31.082	154.932	140.355	
36	9.513	16	22.996	54.019	67.099	171.039	228.645	47.106	58.530	62.606	69.101	58.530	69.101	89.993	
37	0	0	211.000	1.371	2.569	4.812	10.516	2.769	2.131	3.627	3.902	2.131	3.902	13.227	
38	397.000	1.018	3.843	1.406.980	3.988.843	689.000	22.313	6.490	95	2.375	12.719	95	12.719	33.915	
39	0	535.000	4.590	28.234	27.871	63.275	80.640	18.901	7.333	17.415	11.410	7.333	11.410	19.508	
40	11.382	13.811	11.744	24.567	15.306	136.441	204.513	28.697	31.053	40.586	73.548	31.053	73.548	84.501	
41	3.134.876	3.280.132	2.372.488	2.020.144	2.427.931	7.203.340	7.502.821	1.798.318	1.226.765	1.393.432	4.833.520	1.226.765	4.833.520	4.604.937	
42	337.216	375.622	295.385	192.434	183.962	879.685	993.746	170.154	174.011	173.293	443.174	174.011	443.174	484.509	
43	33.000	128.000	77.000	4.760	6.885	17.045	25.488	2.193	1.270	1.163	21.123	1.270	21.123	19.656	
44	17.200	18.229	18.888	337.423	415.077	562.842	634.823	65.270	49.383	47.017	285.829	49.383	285.829	299.904	
45	0	0	0	17.890	19.526	93.250	104.719	24.595	21.321	25.629	17.871	21.321	17.871	16.570	
46	2.876	27.466	29.118	63.651	77.066	331.992	315.071	15.594	24.748	28.739	203.523	24.748	203.523	187.703	
47	0	0	0	36.812	50.637	413.047	509.855	82.160	44.170	85.510	33.487	44.170	33.487	85.789	
48	31.217	60.536	52.855	49.347	59.107	172.969	211.192	29.867	32.721	39.936	72.697	32.721	72.697	70.431	
49	100.187	89.938	88.685	24.961	32.948	132.006	177.419	35.907	22.512	25.366	114.919	22.512	114.919	145.055	
50	7.639	9.435	6.869	125.257	140.313	517.713	586.546	78.204	191.490	190.061	98.641	191.490	98.641	108.806	
51	284.000	0	0	50.103	60.635	349.564	392.160	43.254	12.750	12.195	161.682	12.750	161.682	164.863	
52	-181.000	-869.000	-1.376	124.741	139.369	556.822	423.006	60.910	36.734	60.661	142.128	36.734	142.128	152.239	
53	370.828	408.961	363.543	263.600	312.631	875.008	851.558	255.698	384.870	248.063	136.670	384.870	136.670	153.355	
54	78.455	65.159	36.559	32.148	44.902	206.764	399.171	152.428	114.646	138.423	51.421	114.646	51.421	71.588	
55	17.625	20.441	14.988	16.409	7.509	51.559	155.719	20.419	5.592	12.954	75.166	5.592	75.166	66.457	
56	90.002	93.000	106.889	31.110	36.850	1.027.408	1.508.904	122.783	87.792	90.873	23.910	87.792	23.910	48.036	
57	12.809	3.467	5.097	14.493	22.442	45.698	126.758	28.881	17.537	24.238	54.685	17.537	54.685	57.930	
58	10.009	292.522	348.371	283.057	252.722	1.410.261	1.767.778	407.384	316.302	461.188	426.730	316.302	426.730	336.855	
59	81.366	1.059.997	986.650	430.095	513.146	1.411.528	1.914.397	390.446	225.822	427.734	1.037.155	225.822	1.037.155	998.969	
60	32.219	56.957	54.337	162.605	190.805	348.003	406.151	47.415	153.576	77.638	168.605	153.576	168.605	181.161	
61	138.940	167.140	39.580	34.553	42.574	367.943	401.986	142.956	139.352	141.519	43.018	139.352	43.018	117.575	
62	199.422	294.203	330.767	17.437	26.455	399.854	518.209	164.943	67.402	115.057	78.689	67.402	78.689	107.484	
63	-3.167	30.727	162.156	63.508	83.954	290.102	385.946	33.702	28.710	43.452	60.353	28.710	60.353	111.936	
64	13.013	111.457	115.219	127.627	179.769	303.673	529.837	160.943	115.795	138.779	250.270	115.795	250.270	286.673	
65	17.000	18.928	6.510	0	0	26.437	55.568	5.238	2.222	836	21.218	2.222	21.218	21.295	
66	4.536	64.834	207.916	23.802	36.808	365.680	800.269	185.820	67.145	166.879	153.347	67.145	153.347	188.492	

	Ca		CI		Cash				
	1999	2000	1999	2000	1999	2000			
67 PT United Tractor Tbk.	1.986.339	2.704.201	3.377.078	3.318.260	1.339.465	2.957.705	504.929	424.538	440.232
68 PT Bayer Indonesia Tbk.	232.652	215.975	271.485	164.489	119.621	172.252	22.560	13.225	1.751
69 PT Dankos Laboratories Tbk.	190.074	271.821	341.889	91.351	118.275	128.610	63.056	85.869	106.182
70 PT Indofarma Tbk.	420.593	432.789	688.961	238.803	245.606	289.758	194.695	90.782	107.543
71 PT Kimia Farma Tbk.	589.086	638.063	822.044	446.374	416.685	404.334	186.269	176.317	357.310
72 PT Merck Indonesia Tbk.	71.808	100.928	129.058	23.072	31.986	35.226	0	0	0
73 PT Pyridam Farma Tbk.	7.147	12.906	21.121	4.027	12.492	11.036	382.000	670.000	5.478
74 PT Tempo Scan Pacific Tbk.	596.018	957.319	1.183.363	296.039	290.945	316.125	217.733	507.069	735.569
75 PT Mandom Indonesia Tbk.	151.641	175.073	175.328	86.746	85.052	85.535	2.863	8.479	2.709
76 PT Mustika Ratu Tbk.	160.218	207.375	222.790	30.064	45.192	45.578	76.383	125.192	120.085
77 PT Procter & Gamble Indonesia Tbk.	75.054	81.951	116.083	165.991	84.092	90.369	3.114	9.196	7.474
78 PT Unilever Indonesia Tbk.	1.295.032	1.534.055	1.774.505	803.554	723.389	812.512	519.910	722.647	1.105.735

	STD			Depr			A		REV		PPE		
	1999	2000	2001	2000	2001	1999	2000	1999	2000	2000	2001	2000	2001
67	512.652	3,940.545	2,608.465	925.112	1,108.412	4,429.615	5,450.044	1,031.953	1,273.851	1,419.921	1,388.208	1,684.140	
68	0	7.474	33.464	40.490	51.612	295.670	297.003	202.223	210.893	175.253	63.769	72.760	
69	188.484	196.887	232.879	50.576	63.404	402.164	481.812	182.182	268.621	343.244	64.028	81.548	
70	0	0	4.432	49.110	65.381	486.390	538.173	182.059	272.543	303.793	89.187	100.585	
71	7.800	7.800	49.833	94.643	112.440	704.124	964.463	353.239	553.751	513.471	290.392	318.225	
72	1.040	843.000	0	10.148	11.641	97.359	129.685	71.577	108.416	135.819	12.389	14.802	
73	23.315	8.811	5.108	2.289	3.435	41.275	66.084	8.994	14.145	19.513	52.479	55.134	
74	21.750	29.809	13.906	96.725	112.761	1,083.044	1,428.314	599.027	685.035	818.018	262.981	282.251	
75	13.379	7.065	7.179	61.202	81.909	246.888	333.582	137.128	170.801	173.895	148.987	172.091	
76	14.000	5.473	394.000	25.391	29.710	226.434	278.400	83.586	97.762	130.883	49.214	52.284	
77	4.375	6.126	6.972	0	0	182.625	174.500	138.440	254.720	106.423	52.057	58.000	
78	102.426	104.689	133.808	188.113	224.682	1,815.904	2,253.637	1,810.301	2,276.719	2,756.513	505.967	676.805	

	ΔCA		ΔCL		ΔCash		ΔSTD	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
1 PT Aqua Golden Mississippi Tbk.	14.854	78.757	90.479	125.346	2.938	5.847	-6.158	5.370
2 PT Delta Jakarta Tbk.	89.874	-32.930	49.697	-28.574	32.504	-61.381	2.040	-50.884
3 PT Fast Food Indonesia	47.795	-1.554	33.519	15.134	37.083	-8.874	-2.812	-12.634
4 PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	734.108	-23.996	-1.153.231	2.094.310	-347.835	-593.652	2.310.202	-2.297.754
5 PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	2.763	70.816	55.139	7.760	-33.906	31.429	376	209.317
6 PT Sari Husada Tbk.	167.735	128.255	21.434	30.974	82.764	102.181	4.846	488
7 PT Siantar Top Tbk.	36.623	19.023	67.830	38.226	-18.239	-5.642	7.493	3.310
8 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.	-87.860	56.298	-21.446	20.936	-57.490	43.930	5.747	212.247
9 PT BAT Indonesia Tbk.	-78.894	-49.801	-319.383	-109.570	-44.865	22.702	-22.227	5.271
10 PT Gudang Garam Tbk.	2.464.164	1.992.774	2.418.558	496.181	-878.859	35.973	30.161	21.663
11 PT Handala Manjaya Sampoerna Tbk.	1.926.571	1.462.396	364.965	663.001	526.644	49.167	801.297	-76.427
12 PT Century Textile Industry Tbk.	11.933	3.598	15.350	24.679	-10.682	-4.894	-251	-3.013
13 PT Eratex Djaja Ltd Tbk.	137.766	-77.685	97.527	-67.758	15.525	-61.359	65.404	7.129
14 PT Roda Vivatex Tbk.	-940	-43.710	-10.989	-11.554	-7.247	-53.081	-5.058	-4.415
15 PT Daeyu Orchid Indonesia Tbk.	9.785	12.094	2.991	-340	2.874	4.327	0	0
16 PT Ever Shine Textile Industry Tbk.	92.781	-46.373	65.372	-25.802	54.886	-98.264	-69.321	-65.739
17 PT Fortune Mate Indonesia Tbk.	74.672	-17.696	21.884	-20.483	6.928	53.369	414	713
18 PT Great River International Tbk.	-3.857	-7.360	369.944	275.401	-13.201	-3.429	-139.181	-59.425
19 PT Indo-Rama Synthetics Tbk.	447.031	262.330	550.704	91.517	-100.576	-81.333	79.622	221.295
20 PT Pan Brothers Tex Tbk.	85.427	38.382	9.972	25.854	18.759	4.802	-1.086	1.399
21 PT Ryane Adibusana Tbk.	10.224	16.024	1.589	3.510	-288.937	-869	425.879	-173.000
22 PT Sarasa Nugraha Tbk.	23.862	13.762	-243.485	-2.566	59	14.824	64.570	-6.495
23 PT Surya Intrindo Makmur Tbk.	54.691	36.605	40.877	21.380	4.650	6.307	-23.236	12.535
24 PT Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk.	48.130	15.049	64.002	58.657	6.119	-31.969	28.164	-8.990
25 PT Colorpak Indonesia Tbk.	3.639	17.032	485	1.914	101	13.860	0	74.000
26 PT Lautan Luas Tbk.	159.989	30.809	-89.724	11.467	-20.667	45.743	193.711	-30
27 PT Unggul Indah Cahaya Tbk.	164.391	124.582	930.193	-865.224	-775	-39.888	-788.456	884.497
28 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.	29.000	-14.325	15.852	-16.138	1.884	394	-96.000	-144.833
29 PT Ekadharna Tape Industries Tbk.	4.176	1.457	1.411	-1.397	1.281	11.231	-8.000	140.000
30 PT Intanjaya Internasional Tbk.	-1.704	11.362	19.178	-5.595	5.005	-2.810	-214	745.269
31 PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industry Tbk.	34.159	20.579	25.886	44.031	1.665	-4.557	-4.068	-27.750
32 PT Asiaplast Industries Tbk.	12.921	7.079	482	11.829	-357.495	837.495	4.860	-3.568
33 PT Berlina Co. Ltd. Tbk.	36.122	18.022	18.771	21.258	28.485	-3.480	6.186	8.000

	ΔREV		TA		DA	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
1	21.041	26.672	-0.920	-0.672	0.635	0.829
2	30.995	19.683	-0.204	0.071	1.339	1.639
3	46.928	99.863	-0.465	-0.248	1.096	1.199
4	58.916	127.880	-0.148	-0.083	-0.738	-0.976
5	72.126	22.131	-0.386	-0.768	1.037	0.755
6	58.826	122.749	-0.067	-0.199	1.436	1.120
7	40.461	-4.373	-0.305	-0.246	1.216	1.342
8	16.270	18.270	-0.092	-0.412	1.381	0.999
9	-7.408	-14.944	0.240	-0.096	1.852	1.536
10	376.175	323.537	-0.021	0.021	0.210	0.127
11	400.619	975.555	-0.061	0.006	-0.013	-1.128
12	16.903	-15.594	0.044	-0.063	1.640	1.593
13	57.681	-23.796	-0.275	-0.036	1.234	1.632
14	-20.758	-17.681	-0.476	-0.544	1.182	1.096
15	8.198	-1.513	-0.075	0.082	1.582	1.759
16	-16.369	-36.555	-0.275	-0.166	1.267	1.422
17	-5.323	-11.427	0.160	-0.290	1.832	1.394
18	-42.364	30.289	-0.337	-0.282	1.157	1.079
19	152.988	-67.273	-0.511	-0.440	-0.502	-0.063
20	10.863	7.596	0.335	-0.211	1.979	1.439
21	4.423	12.656	-6.456	3.943	-4.792	5.588
22	26.730	-14.684	1.217	-0.105	2.826	1.588
23	-44	-6.541	0.168	-0.113	1.813	1.540
24	14.212	-7.535	-0.584	-0.255	1.017	1.373
25	-2.329	7.936	0.043	-3.806	1.723	-2.152
26	43.460	15.757	0.044	-0.131	1.571	1.437
27	34.673	72.938	-0.390	-0.327	0.825	0.805
28	-4.916	-603	0.799	0.905	2.481	2.578
29	-5.447	-1.807	-0.017	-2.742	1.665	-1.067
30	-12.583	7.756	-0.534	-5.047	1.145	-3.409
31	-2.633	-5.283	-0.213	-0.208	1.461	1.471
32	7.173	-12.222	1.934	-3.999	3.522	-2.372
33	6.458	21.880	-0.609	-0.429	1.035	1.172

	ΔCA		ΔCL		ΔCash		ΔSTD	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
34 PT Dynaplast Tbk	17.781	372	48.042	59.503	-14.223	-17.270	31.375	-16.933
35 PT Fatrapolindo Nusa Industri Tbk.	18.778	18.680	5.236	2.211	6.729	17.670	-30.997	-17.135
36 PT Igar Jaya Tbk.	27.328	-2.826	37.573	18.144	-25.744	-3.165	-9.497	22.980
37 PT Lapindo Packaging Tbk.	4.042	8.838	91.840	-89.248	194.000	-408.612	0	211.000
38 PT Plastpack Prima Industri Tbk.	-283.490	7.740	-180.507	2.059	797.000	-811.777	-395.982	2.825
39 PT Siwani Makmur Tbk.	14.493	-38.431	10.204	-6.792	-25.323	-4.576	535.000	-530.410
40 PT Summitplast Interbenua Tbk.	65.189	-49.168	20.476	412	23.270	-5.400	2.429	-2.067
41 PT Semen Gresik Tbk.	539.959	1.724.100	-117.807	2.003.115	154.494	1.250.833	145.256	-907.644
42 PT Alumindo Light Metal Industry Tbk.	84.156	-9.888	114.603	96.645	-13.102	17.616	38.406	-80.237
43 PT Betonjaya Manunggal Tbk.	561	8.905	67	-776	519.000	-671.681	95.000	-51.000
44 PT Citra Tubindo Tbk.	55.369	45.160	9.266	15.671	5.521	41.101	1.029	659
45 PT Lion Metal Works Tbk.	10.980	-3.410	651	-6.571	9.180	-13.567	0	0
46 PT Pelangi Indah Canindo Tbk.	-7.639	-256	-31.289	-30.407	3.197	-5.231	24.590	1.652
47 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	72.239	78.745	91.001	92.902	-6.214	12.451	0	0
48 PT Kedaung Indah Can Tbk.	19.933	5.003	-7.237	2.973	3.099	5.675	29.319	-7.681
49 PT Arwana Citramulia Tbk.	9.443	670	19.169	935	1.054	-3.353	-10.249	-1.253
50 PT Komatsu Indonesia Tbk.	31.454	-15.871	-39.784	19.149	-25.654	144.699	1.796	-2.566
51 PT Sumi Indo Kabel Tbk.	34.954	597	37.738	-13.511	33.578	3.918	-284.000	0
52 PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk.	-128.266	52.083	-628.352	65.026	-133.403	-39.005	-688.000	867.624
53 PT Astra Graphia Tbk.	-93.760	-15.903	-99.869	-4.034	-91.182	-31.628	38.133	-45.418
54 PT Metrodata Electronics Tbk.	155.514	111.930	47.159	64.210	76.000	59.936	-13.296	-28.600
55 PT Multi Agro Persada Tbk.	21.738	-29.063	21.123	-10.117	-1.409	-16.495	2.816	-5.453
56 PT Multipolar Corporation Tbk.	98.056	128.999	169.651	-7.684	-1.640	10.969	2.998	13.889
57 PT Andhi Candra Automotive Productis Tbk.	37.993	12.056	4.967	-3.611	-897.507	19.679	-9.342	1.630
58 PT Astra Otoparts Tbk.	261.462	-38.485	-95.486	-223.249	-28.093	61.103	282.513	55.849
59 PT Branta Mulia Tbk.	291.333	-35.322	-577.498	-120.855	-21.589	56.000	978.631	-73.347
60 PT Goodyear Indonesia Tbk.	24.301	-29.559	24.886	-21.082	-4.685	1.668	24.738	-2.620
61 PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	36.703	95.454	-24.952	255.115	-39.650	-38.073	28.200	-127.560
62 PT Intraco Penta Tbk.	87.950	169.440	24.600	145.171	-18.160	-884	94.781	36.564
63 PT Prima Alloy Steel Universal Tbk.	58.796	-3.346	58.571	10.091	1.991	-719	33.894	131.429
64 PT Selamat sempurna Tbk.	97.478	16.812	18.852	-13.707	24.963	10.911	98.444	3.762
65 PT Sugi Samapersada Tbk.	26.390	-2.514	26.651	-18.015	392.000	290.000	1.928	-12.418
66 PT Tunas Ridean Tbk.	389.964	277.501	300.501	93.983	-34.190	-10.029	60.298	143.082

	ΔREV		TA		DA	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
34	36.319	14.696	-0,518	-0,400	1,006	1,136
35	24.491	4.292	-0,130	-0,275	1,431	1,334
36	4.076	-15.500	-0,170	-0,472	1,469	1,199
37	1.496	-858	-58,846	27,875	-57,175	29,547
38	2.280	4.115	-2,774	-142,258	-1,108	-140,605
39	10.082	1.486	-8,433	5,896	-6,783	7,605
40	9.533	-11.889	-0,041	-0,281	1,585	7,561
41	166.667	404.886	-0,231	-0,407	-0,889	1,385
42	-718	-3.139	-0,282	-0,229	1,213	-1,462
43	-107	1.030	-36,273	28,463	-34,605	1,253
44	-2.366	18.253	-0,529	-0,673	1,034	30,129
45	4.308	-1.034	-0,180	-0,027	1,479	0,841
46	3.991	-13.145	-0,204	-0,138	1,379	1,644
47	41.340	-3.350	-0,120	-0,152	1,457	1,488
48	7.215	-10.069	-0,316	-0,261	1,315	1,486
49	2.854	10.541	-0,193	-0,161	1,429	1,407
50	-1.429	-111.857	-0,058	-0,541	1,579	1,433
51	-555	31.059	0,565	-0,129	2,175	1,320
52	23.927	249	2,149	-2,319	3,717	1,415
53	-136.807	7.635	-0,234	-0,291	1,668	-0,706
54	23.777	14.005	0,065	-0,071	1,670	1,306
55	7.362	7.465	-0,334	-0,029	1,296	1,546
56	3.081	31.910	-0,101	0,050	1,558	1,604
57	6.701	4.643	20,250	-0,222	21,889	1,639
58	144.886	-53.804	-0,128	-0,105	1,074	1,421
59	201.912	-37.288	-0,367	-0,214	0,465	1,543
60	-75.938	-30.223	-0,527	-0,488	1,236	1,127
61	2.167	1.437	0,105	-0,091	1,758	1,175
62	47.655	49.886	-0,077	-0,073	1,468	1,533
63	14.742	-9.750	-0,342	-0,591	1,279	1,457
64	22.984	22.164	-0,568	-0,309	0,958	1,203
65	-1.386	4.402	-14,911	-4,716	-13,241	-3,058
66	99.734	18.941	0,108	0,017	1,515	1,576

	ΔCA		ΔCL		ΔCash		ΔSTD	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
67 PT United Tractor Tbk.	717.862	672.877	-1.978.795	1.618.240	-80.391	15.694	3.427.893	-1.332.080
68 PT Bayer Indonesia Tbk.	-16.677	55.510	-44.868	52.631	-9.335	-11.474	7.474	25.990
69 PT Dankos Laboratories Tbk.	81.747	70.068	26.924	10.335	22.813	20.313	8.403	35.992
70 PT Indofarma Tbk.	12.196	256.172	6.803	44.152	-103.913	16.761	0	4.432
71 PT Kimia Farma Tbk.	48.977	183.981	-29.689	-12.351	-9.952	180.993	0	42.033
72 PT Merck Indonesia Tbk.	29.120	28.130	8.914	3.240	0	0	841.960	-843.000
73 PT Pyridam Farma Tbk.	5.759	8.215	8.465	-1.456	288.000	-664.522	-14.504	-3.703
74 PT Tempo Scan Pacific Tbk.	361.301	226.044	-5.094	25.180	289.336	228.500	8.059	-15.903
75 PT Mandom Indonesia Tbk.	23.432	255	-1.694	483	5.616	-5.770	-6.314	114
76 PT Mustika Ratu Tbk.	47.157	15.415	15.128	386	48.809	-5.107	-8.527	388.527
77 PT Procter & Gamble Indonesia Tbk.	6.897	34.132	-81.899	6.277	6.082	-1.722	1.751	846
78 PT Unilever Indonesia Tbk.	239.023	240.450	-80.165	89.123	202.737	383.088	2.263	29.119

	ΔREV		TA		DA	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
67	241.898	146.070	-0,356	-0,135	0,249	0,546
68	8.670	-35.640	-0,035	-0,213	1,596	1,506
69	86.439	74.623	-0,067	-0,124	1,404	1,364
70	90.484	31.250	0,124	0,233	1,576	1,803
71	200.512	-40.280	-0,009	-0,144	1,135	1,483
72	36.839	27.403	-8,545	6,603	-6,949	8,216
73	5.151	5.368	-6,747	10,206	-5,104	11,848
74	86.008	132.983	-0,026	-0,087	1,365	1,198
75	33.673	3.094	-0,143	-0,229	1,402	1,369
76	14.176	33.121	-0,149	-1,430	1,478	0,156
77	116.280	-148.297	0,443	0,165	1,858	2,122
78	466.418	479.794	-0,041	-0,215	0,466	0,193

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PPE, DREV ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.040 ^a	.002	-.011	13.38830

a. Predictors: (Constant), PPE, DREV

b. Dependent Variable: TA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.855	2	21.927	.122	.885 ^a
	Residual	27424.741	153	179.247		
	Total	27468.596	155			

a. Predictors: (Constant), PPE, DREV

b. Dependent Variable: TA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1.676	1.179			-1.421	.157
	DREV	2.060E-06	.000	.018		.207	.837
	PPE	4.120E-07	.000	.028		.319	.750

a. Dependent Variable: TA

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	TA
37	-4.271	-58.85
116	-10.502	-142.26

a. Dependent Variable: TA

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-1.9573	1.1340	-1.4328	.53192	156
Residual	-140.6050	30.1290	.0000	13.30165	156
Std. Predicted Value	-.986	4.825	.000	1.000	156
Std. Residual	-10.502	2.250	.000	.994	156

a. Dependent Variable: TA

UJI T

2000

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DA	78	-.2064152	8.39128762	.95012623

One-Sample Test

Test Value = 0						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
DA	-.217	77	.829	-.2064152	-2.0983582	1.6855278

2001

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DA	78	.2064152	16.90164016	1.91373390

One-Sample Test

Test Value = 0						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
DA	.108	77	.914	.2064152	-3.6043158	4.0171462

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Discretionary Acrual	-.2064152	78	8.39128762	.95012623
	Discretionary Acrual	-1.2292735	78	16.90468204	1.91407832

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Discretionary Acrual & Discretionary Acrual	78	-.238	.036

Paired Samples Test

		Paired Differences		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Discretionary Acrual - Discretionary Acrual	1.0228583	20.58067147	2.33030217

Paired Samples Test

		Paired Differences		t	df	Sig. (2-tailed)
		95% Confidence Interval of the Difference				
		Lower	Upper			
Pair 1	Discretionary Acrual - Discretionary Acrual	-3.6173661	5.6630827	.439	77	.662